

Nomor : 0072/SDAR/BSNP/V/2016
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pelaksanaan dan Pemanfaatan Hasil UN Perbaikan

17 Mei 2016

Yang terhormat:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
- Di seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) merupakan lembaga independen dan profesional yang memiliki kewenangan menyelenggarakan Ujian Nasional sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan hasil pemantauan dan sebagai bentuk respon terhadap pertanyaan, pengaduan, atau aspirasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan dan pemanfaatan Ujian Nasional Perbaikan (UNP), dengan ini kami memberikan penjelasan sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Ujian Nasional Perbaikan

1. Dasar pelaksanaan UNP adalah:
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pada SMP/MTs atau Yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau Yang Sederajat; dan
 - b. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0034/P/BSNP/XII/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016.
2. Ujian Nasional Perbaikan adalah Ujian Nasional pada jenjang SMA/MA/ SMAK/SMTK, SMK/MAK, dan Program Paket C untuk peserta UN tahun 2015 dan 2016 yang memenuhi persyaratan.
3. Persyaratan Peserta UNP
 - a. memiliki nomor peserta UN seperti yang tercantum dalam kartu peserta UN 2015 dan 2016; dan
 - b. memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 55 (lima puluh lima) pada mata ujian tertentu; atau
 - c. belum menempuh UN atau UN Susulan atau belum menempuh UN secara lengkap.
4. Teknis Pelaksanaan UNP
 - a. Ujian Nasional Perbaikan dilaksanakan dalam bentuk ujian berbasis komputer.
 - b. Soal UNP mengacu pada kisi-kisi UN 2015/2016.
 - c. Hasil UNP dilaporkan dalam bentuk Sertifikat Hasil Ujian Nasional Perbaikan (SHUNP) yang memuat nilai mata ujian yang ditempuh pada UNP dan ditandatangani oleh Ketua Pelaksana UNP yang ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Jadwal Pelaksanaan UNP

No	Tahapan Kegiatan	Tanggal
1	Pendaftaran online melalui web unp.kemdikbud.go.id	1 Juni s.d. 16 Juli 2016
2	Pendaftaran ulang di satuan Pendidikan penyelenggara UNP	9 s.d. 11 Agustus 2016
3	Latihan Ujian	22 s.d. 24 Agustus 2016
4	Pelaksanaan UNP	29 Agustus s.d. 7 September 2016
5	Pengumuman hasil UNP	17 September 2016

B. Pemanfaatan Hasil UNP

- Hasil UNP digunakan untuk:
 - Pemetaan mutu program dan/atau Satuan Pendidikan;
 - Pertimbangan seleksi masuk jenjang Pendidikan berikutnya; dan
 - Pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan kepada Satuan Pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu Pendidikan.
- Nilai UN yang digunakan untuk pertimbangan seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b di atas bagi peserta UNP adalah nilai yang terbaik.

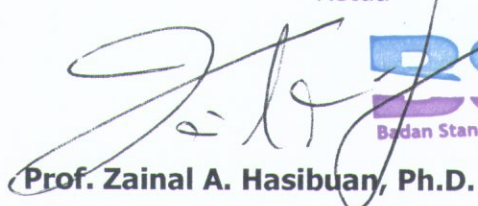
Mengingat semakin mendekatnya pelaksanaan UNP tahun 2016, kami minta Saudara untuk meneruskan surat edaran ini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di wilayah Saudara.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dijadikan acuan sebagaimana mestinya dan atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

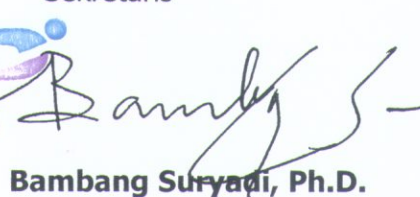
Hormat kami

Ketua

Sekretaris


Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D.




Bambang Suryadi, Ph.D.

Tembusan

- Kepala Balitbang, Kemdikbud
- Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud
- Dirjen PAUD dan Dikmas, Kemdikbud
- Inspektorat Jenderal, Kemdikbud
- Kepala Puspendik, Kemdikbud

Lampiran Surat nomor : 0072/SDAR/BSNP/V/2016
Tanggal Surat : 17 Mei 2016

No.	PROVINSI
1.	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2.	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3.	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4.	Dinas Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta
5.	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
6.	Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
7.	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
8.	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
9.	Dinas Pendidikan Provinsi Riau
10.	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
11.	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
12.	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
13.	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
14.	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
15.	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
16.	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
17.	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara
18.	Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara
19.	Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah
20.	Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
21.	Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara
22.	Dinas Pendidikan Provinsi Maluku
23.	Dinas Pendidikan Provinsi Bali
24.	Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat
25.	Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur
26.	Dinas Pendidikan Provinsi Papua
27.	Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu
28.	Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara
29.	Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo
30.	Dinas Pendidikan Provinsi Banten
31.	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
32.	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
33.	Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat
34.	Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat

Lampiran Surat nomor : 0072/SDAR/BSNP/V/2016
Tanggal Surat : 17 Mei 2016

No.	PROVINSI
1.	Kakanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta
2.	Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat
3.	Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah
4.	Kakanwil Kemenag Provinsi DI Yogyakarta
5.	Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur
6.	Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh
7.	Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara
8.	Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat
9.	Kakanwil Kemenag Provinsi Riau
10.	Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi
11.	Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan
12.	Kakanwil Kemenag Provinsi Lampung
13.	Kakanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat
14.	Kakanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah
15.	Kakanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan
16.	Kakanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Timur
17.	Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Utara
18.	Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah
19.	Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan
20.	Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara
21.	Kakanwil Kemenag Provinsi Maluku
22.	Kakanwil Kemenag Provinsi Bali
23.	Kakanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Barat
24.	Kakanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur
25.	Kakanwil Kemenag Provinsi Papua
26.	Kakanwil Kemenag Provinsi Bengkulu
27.	Kakanwil Kemenag Provinsi Maluku Utara
28.	Kakanwil Kemenag Provinsi Gorontalo
29.	Kakanwil Kemenag Provinsi Banten
30.	Kakanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
31.	Kakanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Riau
32.	Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Barat
33.	Kakanwil Kemenag Provinsi Papua Barat